

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah

Fitri Mustakim¹, Suasa¹, Muh Nawawi¹

¹ Universitas Tadulako

email : Fitrimustakim17@gmail.com ^{1*}

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 12 Mei 2024

Revised : 11 Juni 2024

Accepted : 12 Juni 2024

Keywords: Policy

Evaluation, Technical

Feasibility, Administrative

Feasibility,

Political Feasibility.

Kata Kunci: Evaluasi

Kebijakan, Technical

Feasibility, Administrative

Operability,

Political Viability.

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This study aims to analyse and evaluate Central Sulawesi provincial government policies to increase Regional Fiscal Capacity. This research uses a qualitative approach with descriptive research type.

The results showed that the evaluation of policies to increase Regional Fiscal Capacity in Central Sulawesi province based on the theory of Policy Evaluation according to Bardach, (Patton et al., 2013), including Technical Feasibility and Administrative Operability criteria has not been effective and optimal. However, the criteria of Political viability and Economy and Financial Possibility have gone quite well. It can be seen that employee expenditure in Central Sulawesi province cannot be covered by local revenue, with the remaining budget only around 1%-2% after deductions, making it insufficient for other expenditures such as goods/services, grants, capital, and other priorities. The high personnel expenditure indicates that a large proportion of the local budget is used to pay employees. In 2020 to 2022, the Regional Fiscal Capacity (KFD) of Central Sulawesi province decreased significantly. The decline in Regional Fiscal Capacity (KFD) shows that the measures taken have not been effective. In addition, the local government of Central Sulawesi province is still dependent on transfer revenues due to low Regional Original Revenue (PAD). Although revenue exceeds the target, PAD still does not meet the Regional Fiscal Capacity. Furthermore, coordination between regional apparatus in preparing the APBD is reflected in the role of BPKAD, which actively coordinates with all regional apparatus to find out their respective priorities before being set as a policy. Even the decision-making process involves all elements in BAPENDA to ensure good coordination vertically and horizontally, so that all parties are involved and responsible. And the increasing availability of the budget shows that the economy and financial support are not the main obstacles, but the determinants of the success of a policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan Kapasitas

Fiskal Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan terhadap peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah di provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan teori Evaluasi Kebijakan menurut Bardach, (Patton dkk., 2013), mencakup kriteria Technical Feasibility dan Administrative Operability belum berjalan efektif dan optimal. Namun pada kriteria Political viability dan Economy and Financial Possibility sudah cukup berjalan dengan baik. Hal itu dilihat bahwa pengeluaran pegawai di provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat ditutupi oleh Pendapatan Asli Daerah, dengan sisa anggaran hanya sekitar 1%-2% setelah pengurangan, sehingga tidak mencukupi untuk belanja lainnya seperti barang/jasa, hibah, modal, dan prioritas lainnya. Dengan pengeluaran pegawai yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk membayar pegawai. Pada tahun 2020 hingga 2022, Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Sulawesi Tengah menurun signifikan. Penurunan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil belum efektif. Selain itu pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah masih bergantung pada pendapatan transfer karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Meski pendapatan melebihi target, PAD tetap tidak mencukupi Kapasitas Fiskal Daerah. Selanjutnya koordinasi antar perangkat daerah dalam menyusun APBD tercermin dari peran BPKAD yang aktif berkoordinasi dengan semua perangkat daerah untuk mengetahui prioritas masing-masing sebelum ditetapkan sebagai kebijakan. Bahkan proses pengambilan keputusan melibatkan semua unsur di BAPENDA untuk memastikan koordinasi yang baik secara vertikal dan horizontal, sehingga semua pihak terlibat dan bertanggung jawab. Serta ketersediaan anggaran yang terus meningkat menunjukkan bahwa ekonomi dan dukungan finansial bukanlah kendala utama, melainkan penentu keberhasilan suatu kebijakan.

1. LATAR BELAKANG

Kapasitas fiskal daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kemampuan keuangan pemerintah daerah tersebut untuk mengelola pendapatan dan belanja guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Kapasitas fiskal daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sumber daya alam, potensi ekonomi, tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta kemampuan dalam mengelola keuangan secara efisien dan transparan. Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang masuk dalam wilayah Indonesia bagian tengah dan potensi sumber daya alam yang cukup besar seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan tambang. Potensi ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah jika dikelola dengan baik. Selain itu, Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki potensi pariwisata yang menarik, seperti Taman Nasional Lore Lindu dan potensi tambang nikel yang berada di Kabupaten Morowali yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan melalui sektor pariwisata dan tambang (Aprianti, 2020).

Aktivitas ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah masih terus melaju dengan kuat ditengah peningkatan prospek perlambatan ekonomi global akibat Covid-19. Dalam mewujudkan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah kearah yang lebih maju dan sejahtera tentunya ada hal yang

berupa tantangan harus dihadapi seperti tantangan kependudukan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kondisi geografis, serta yang tidak kalah menariknya yakni tantangan akibat Covid-19 yang bukan hanya melanda Indonesia tetapi seluruh dunia ikut merasakan dampak dari adanya Covid-19. Meskipun pada lajur neraca ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah masih mengarah pada taraf yang positif akan tetapi neraca tersebut tidak merata pada semua sektor.

Pelaksanaan otonomi daerah pada kenyataannya kemandirian keuangan masih perlu diperhatikan karena masih banyak daerah yang belum mampu mandiri dari segi keuangan yang artinya daerah tersebut tidak mampu menjalankan otonominya. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pengelolaan potensi sumber daya daerah yang kurang efektif sehingga memicu tingkat pendapatan daerah. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang sangat rendah akan mendapat pendapatan transfer seperti dana alokasi umum yang cukup tinggi untuk penganggaran daerahnya, namun hal tersebut tentunya mempunyai pengaruh terhadap peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Berdasarkan pada peta kapasitas fiskal daerah Tahun 2020 sampai Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I, Kabupaten/Kota serta Provinsi yang menjadi fokus pelaksanaan otonomi daerah masih mengalami masalah kemampuan keuangan dengan tajuk permasalahan yang berbeda-beda. Berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan R.I. tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, kapasitas fiskal suatu daerah dapat dihitung dengan jumlah pendapatan asli daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja pegawainya. Merujuk pada data bahwa provinsi Sulawesi Tengah memiliki rentang ketergantungan atas dana transfer dari pemerintah pusat dan hal tersebut dibuktikan dengan data kategori kapasitas fiskal daerah yakni tahun 2020 kategori rendah, tahun 2021 kategori rendah, dan tahun 2022 kategori sangat rendah.

Berdasarkan data tersebut, KFD Provinsi Sulawesi Tengah dalam rentang tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif bahkan pada Tahun 2022 atau satu tahun terakhir ini menunjukkan hal semakin buruk yakni berada pada kategori sangat rendah terhadap kemandirian pembiayaan atas daerah sendiri. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang dapat meningkatkan KFD Sulawesi Tengah. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti pendapatan asli daerah yang rendah, kurangnya pemanfaatan sumber daya alam dan juga belanja pegawai yang semakin tinggi. Pendapatan asli daerah merupakan pemasukan daerah yang dihasilkan dari sumber-sumber milik daerah yang memiliki potensi untuk turut menaikkan perekonomian daerah itu sendiri. Jika daerah dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya, memaksimalkan potensi daerahnya, dan menekan angka belanja pegawai daerah maka daerah tersebut akan dapat membiayai daerahnya sendiri yang akhirnya daerah tidak ketergantungan atas transfer dari pusat.

Tingkat pendapatan asli daerah (PAD) juga mempengaruhi kapasitas fiskal daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan PAD dapat dicapai melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset daerah, dan pengembangan sektor ekonomi lokal. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor-sektor potensial, meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak, dan mendorong investasi di daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat juga berkontribusi pada kapasitas fiskal daerah Sulawesi Tengah. Peningkatan alokasi dana transfer yang adil dan berkeadilan dapat membantu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah Sulawesi Tengah dalam menentukan alokasi dana transfer. Koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah pusat, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat juga penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Sinergi antara berbagai pihak dapat

memperkuat upaya dalam memperbaiki manajemen keuangan, meningkatkan investasi, dan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, mengadopsi praktik tata kelola keuangan yang baik, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang akan dibahas pada penelitian ini. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah”.

Penelitian ini dapat membantu dalam membangun atau memperluas kerangka konseptual yang relevan dalam bidang kebijakan fiskal daerah. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas fiskal daerah dan hubungannya dengan pembangunan dan pelayanan publik, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi variabel-variabel kunci dan hubungan yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan. Meskipun penelitian ini berfokus pada kasus Provinsi Sulawesi Tengah, temuan dan pembelajaran dari penelitian ini dapat memiliki implikasi yang relevan dan dapat diterapkan di daerah-daerah lain, baik di Indonesia maupun di negara lain. Masalah kapasitas fiskal daerah seringkali menjadi perhatian diberbagai konteks regional dan internasional, dan penelitian ini dapat memberikan panduan dan wawasan bagi pemerintah daerah di tempat lain yang menghadapi tantangan serupa.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah, keputusan, atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan mencapai tujuan tertentu atau mengatasi masalah dalam masyarakat. Ruang lingkup kebijakan pemerintah bisa meliputi berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi, keamanan, dan lainnya. Kebijakan ini direncanakan sebagai respons terhadap isu-isu yang diidentifikasi, dan disusun melalui proses khusus yang melibatkan undang-undang, regulasi, tindakan administratif, serta alokasi dana oleh lembaga-lembaga pemerintah. Kebijakan ini memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan dan mendukung terciptanya hubungan saling bertanggung jawab antara negara dan warganya. Individu dan kelompok berupaya mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dengan mengorganisir kepentingan bersama dan memengaruhi pembuat keputusan melalui upaya lobi politik dan penyuluhan publik. Kebijakan pemerintah menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan yang harus dijalankan (Andhika, 2019).

Kebijakan pemerintah, sesuai dengan definisi dan argumen yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye dalam Subarsono (2013), merujuk pada segala tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau dihindari. Definisi ini secara rinci mengklarifikasi mengapa tindakan atau ketidakhadiran tindakan pemerintah dapat berada dalam atau di luar hukum. Dalam hal ini, para akademisi dan praktisi telah menggagas dasar untuk menerima pemahaman yang komprehensif mengenai arti dari setiap regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah. Keputusan dan kebijakan pemerintah, yang dibentuk dengan tujuan mengatasi persoalan publik, dapat dipandang sebagai kerangka kerja yang merangkum seluruh langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai sasaran public (Andhika, 2019).

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan aktivitas yang melibatkan estimasi atau penilaian mengenai kebijakan yang mencakup aspek substansi, implementasi, dan dampaknya. Evaluasi kebijakan dianggap sebagai tindakan yang memiliki peranan fungsional. Ini berarti evaluasi kebijakan tidak

hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan juga diterapkan dalam seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, konsep evaluasi berhubungan dengan penggunaan berbagai skala nilai untuk menilai hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup serangkaian tindakan seperti mengambil kesimpulan, mengklarifikasi, memberikan kritik, melakukan penyesuaian, dan melakukan perumusan kembali terhadap masalah yang dihadapi.

Evaluasi memiliki beberapa peran utama dalam analisis kebijakan. Yang pertama dan sangat penting, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang kriteria kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang yang telah dicapai melalui tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, evaluasi mengungkapkan sejauh mana pencapaian tujuan dan target tertentu. Kedua, evaluasi memberikan kontribusi dalam mengklarifikasi dan mengkritik nilai-nilai yang menjadi dasar pemilihan tujuan dan target. Nilai-nilai ini didefinisikan secara lebih jelas dengan merumuskan serta menerapkan tujuan dan target. Nilai-nilai ini juga dikritik dengan mengajukan pertanyaan tentang relevansi tujuan dan target dalam konteks permasalahan yang dihadapi. Ketiga, evaluasi memberikan kontribusi dalam menerapkan berbagai metode analisis kebijakan lainnya, termasuk merumuskan masalah dan memberikan rekomendasi. Informasi tentang kinerja kebijakan yang kurang memadai dapat membantu dalam merumuskan kembali masalah kebijakan. Evaluasi juga bisa berkontribusi dalam mengidentifikasi alternatif kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang sudah ada, dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang sebelumnya diusulkan perlu digantikan dengan opsi lain.

Kapasitas Fiskal Daerah

Desentralisasi telah memainkan peranan penting dalam agenda reformasi kelembagaan di setiap negara di berbagai belahan dunia. Tekanan internal dan eksternal telah memaksa banyak negara berkembang untuk meningkatkan administratif, fiskal, dan kekuatan politik yang pemerintah pusat berikan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi adalah salah satu bentuk otonomi daerah yang diharapkan dapat dimaksimalkan memajukan pemerataan pembangunan daerah dan negara proliferasi (Brocker dkk., 2019).

Kapasitas fiskal ialah suatu bentuk dalam menilai kemampuan daerah untuk membiayai dirinya yang terdapat pada APBD yang mana tujuannya akhirnya adalah kualitas pelayanan publik. Kapasitas fiskal ialah salah satu bentuk alat yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal melalui banyaknya kebijakan yang dihasilkan. Pemerintah pusat tentunya pihak yang tidak terpisahkan dengan kapasitas fiskal daerah, adapun bentuk keterkaitan pemerintah pusat dengan kapasitas fiskal ialah pemerintah pusat yang selalu berupaya dalam meningkatkan meratanya layanan yang diperoleh masyarakat salah satu bentuk hal melalui kebijakan yang dapat mewujudkan hal tersebut yaitu adanya dana transfer yang disalurkan pusat kepada pemerintah daerah (Saparmanto dan Syapsan, 2022).

Konsep kapasitas fiskal berfokus terutama pada kesenjangan antara defisi nasional dan kemampuan pemerintah untuk mengatasinya. Suatu negara dapat mengatasi tantangan fiskalnya dengan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak atau pendapatan ekspornya, tetapi dalam praktiknya, hal ini sulit dicapai dalam jangka pendek. Definisi ini mempersempit ruang lingkup kapasitas fiskal lebih jauh dari konsep ruang fiskal. Kapasitas keuangan didefinisikan oleh Compson dan Navratil (1997) sebagai potensi suatu wilayah untuk meningkatkan pemanfaatan semua sumber energi yang tersedia. Selain itu, terdapat berbagai macam teknik pengukuran yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan keuangan suatu daerah, dan masing-masing teknik tersebut memiliki keterbatasannya masing-masing. Dijelaskan secara lebih rinci bahwa ada dua kategori besar untuk menghitung kapasitas keuangan. Ini adalah indeks pendapatan relatif yang dapat dinaikkan sesuai dengan standar kebijakan fiskal tertentu dan indeks relatif kegiatan ekonomi atau pendapatan

daerah. Kapasitas fiskal diperoleh melalui penerimaan daerah, adapun rumus kapasitas fiskal ialah sebagai berikut (Saparman dan Syapsan, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Jenis perspektif yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Penelitian deskriptif merupakan bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu biasa berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan anatara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. (Sukmadinata, 2006).

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebelum terbentuknya daerah otonomi Sulawesi Tengah, kekuasaan pemerintahan masih dipegang oleh raja-raja yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah. Pada masa itu wilayah provinsi Sulawesi Tengah merupakan sebuah Pemerintahan Kerajaan, terdiri dari Tujuh Kerajaan di wilayah Timur dan delapan Kerajaan di wilayah barat, dan raja-raja ini mempunyai daerah dan kekuasaan sendiri-sendiri. Namun dengan adanya perkembangan sistem pemerintahan kerajaan dan hubungan sosial ekonomi (perdagangan), maka kerajaan-kerajaan ini perlahan-lahan mendapat pengaruh dari luar, antara lain dari kerajaan Bone, Gowa, Luwu, Mandar dan Ternate. Bahkan pada akhir abad XIX kerajaan di wilayah Sulawesi Tengah sudah ada yang menjalin hubungan dengan luar negeri seperti Portugis, Spanyol dan VOC (Belanda).

Pembahasan Penelitian

Kebijakan fiskal daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah tergambar dalam APBD Provinsi Sulawesi Tengah dimana dalam rentang waktu 2009-2020 berpengaruh negatif sehingga tidak signifikan oleh belanja-belanja lain yang di lakukan oleh pemerintah daerah. Secara proporsional, pendapatan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah masih lebih banyak berasal dari Dana Transfer Pusat yakni Dana Perimbangan dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, perkembangan belanja daerah cenderung mengikuti pola perkembangan transfer dari pemerintah pusat, yaitu Dana Perimbangan. Kondisi penganggaran ini menunjukkan adanya ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan program pemerintah daerah. Kecenderungan peningkatan belanja pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah ini dikenal sebagai Ilusi Fiskal atau *hipotesis Flypaper Effect*. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari Yulia (2007), menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah (Aprianti, Y. (2020).

Penelitian yang telah dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, penulis menemukan beberapa dinamika yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan melakukan analisa terkait dengan fokus penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan perspektif teoritis.

Dalam melaksanakan wawancara terhadap sejumlah informan terpilih, digunakan bahasa yang sederhana disesuaikan dengan bahasa yang dipergunakan pada lingkungan sosial budaya yang sederhana. Wawancara tersebut tetap dalam konteks pemahaman informan mengenai hal yang sesuai dengan materi wawancara tanpa interpretasi dari peneliti untuk menggiring jawaban

informan. Berdasarkan metode tersebut, peneliti mengharapkan suatu konsep dari realitas yang tumbuh dari aparat birokrasi di lingkungan tempat meneliti.

1. Technical Feasibility

Indikator *Technical feasibility* atau kelayakan teknis merupakan suatu kegiatan yang akan menentukan sumber daya teknis yang akan digunakan. Apabila poin ini memberikan efek yang positif terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentu sumber daya teknis yang digunakan sudah sesuai dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang hasilnya akan memberikan nilai yang baik atas kapasitas fiskal daerah, namun sebaliknya apabila poin ini hanya menunjukkan nilai yang negatif tentu penilaian kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah atas kapasitas fiskal daerah akan buruk dan daerah tersebut memiliki rentang ketergantungan atas transfer dana dari pusat.

Kesimpulan diatas menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal kemampuan membiayai dirinya sendiri melalui pendapatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Provinsi Sulawesi Tengah berhasil menunjukkan tren positif dalam hal peningkatan pendapatan. Ini berarti bahwa setiap tahun, pendapatan provinsi mengalami kenaikan yang konsisten, yang merupakan indikator kesehatan finansial yang baik. Pendapatan yang diperoleh tidak hanya meningkat, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan implementasi strategi pengelolaan pendapatan berjalan dengan sangat efektif.

2. Administrative Operability

Indikator *Administrative operability* atau daya dukung politis merupakan suatu kegiatan yang lebih menitik beratkan pada ukuran aspek administrasi dalam proses pelaksanaan kebijakan kedepannya. Ukuran yang dimaksudkan disini yakni komitmen antar instansi, kapabilitas, dukungan organisasi, dan hal-hal lain yang memungkinkan terwujudnya sistem pelayanan. Sehingga ukuran yang dimaksud adalah penentu kebijakan yang akan memungkinkan terjadi dampak kegunaan yang benar-benar bisa berguna pada penilaian kapasitas fiskal daerah atas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan demikian hasil penelitian pada kriteria *Administrative Operability* terhadap Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah menunjukkan bahwa penyusunan APBD di Sulawesi Tengah setiap tahun berjalan lancar dan tepat waktu. Namun, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih bergantung pada pendapatan transfer karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum bisa mengcover belanja pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal, perlu pengurangan belanja pegawai dan peningkatan PAD. Penyusunan target pendapatan oleh BAPENDA tidak rumit, tapi realisasi diketahui setelah tahun berjalan. Meski pendapatan melebihi target, PAD tetap tidak mencukupi kapasitas fiskal daerah. Kendala utama bukan pada aturan, tapi pada kapasitas fiskal yang belum membaik, dengan penilaian berdasarkan PAD, transfer pusat, dan belanja pegawai.

3. Political Viability

Indikator *Political viability* atau daya dukung politis dalam penelitian ini adalah merupakan salah satu kriteria yang akan digunakan untuk mengukur suatu kebijakan apakah kebijakan tersebut dianggap berhasil karena terdapat pengaruh dari kelompok yang mempunyai kekuasaan seperti: legislator, organisasi sosial, pembuat keputusan, administrator, organisasi kemasyarakatan, ataupun aliansi-aliansi politik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang muaranya terhadap penilaian kapasitas fiskal tentu pada proses pelaksanaannya terdapat hal-hal yang mempengaruhi sehingga

hasil akhirnya merujuk pada hal yang positif yakni Provinsi Sulawesi Tengah sudah mempunyai kemandirian fiskal sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Dengan demikian hasil penelitian pada kriteria *Political Viability* terhadap Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah menunjukkan cukup berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dalam menyusun APBD tercermin dari peran BPKAD yang berkoordinasi dengan semua perangkat daerah untuk mengetahui prioritas masing-masing sebelum ditetapkan sebagai kebijakan. Proses pengambilan keputusan melibatkan semua unsur di BAPENDA untuk memastikan koordinasi yang baik secara vertikal dan horizontal, sehingga semua pihak terlibat dan bertanggung jawab, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Di Provinsi Sulawesi Tengah, pengelolaan anggaran oleh BPKAD berjalan lancar berkat partisipasi aktif semua perangkat daerah. Perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsi APBD sesuai kebutuhan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Dukungan berbagai kalangan diharapkan dapat memajukan provinsi Sulawesi Tengah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, termasuk melalui pemungutan retribusi daerah, untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas fiskal serta memanfaatkan potensi ekonomi daerah sebagai sumber pendapatan.

4. *Economy and Financial Possibility*

Aspek *Economy and Financial Possibility* dalam penelitian ini merupakan potensi ekonomi dan kemampuan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yang melibatkan biaya dalam pelaksanaan program dan kebijakan serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan dan program tersebut mencakup elemen nyata dan abstrak, yang dapat diuangkan atau tidak, serta manfaat dan biaya yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Dengan demikian hasil penelitian dari aspek *Economy and Financial Possibility* menunjukkan sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari dukungan ekonomi dan finansial merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan KFD dan kebijakan lainnya. Ketersediaan anggaran yang terus meningkat menunjukkan bahwa ekonomi dan dukungan finansial bukanlah kendala utama, melainkan penentu keberhasilan suatu kebijakan. Segala hal terkait kebijakan sudah ditetapkan jumlah penganggarnya, menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan tanpa terhalang oleh faktor ekonomi.

Hal itu sejalan dengan konsep Bardach (Patton dkk., 2013) tentang kriteria evaluasi kebijakan dalam aspek *Economy and Financial Possibility* yakni potensi ekonomi dan keuangan dari kebijakan atau program. Penilaiannya melibatkan hal berikut: Pertama, adanya biaya program atau kebijakan yang memungkinkan dibutuhkan pada saat pelaksanaannya; dan Kedua, manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. Dimensi pengukuran terkait hal ini meliputi elemen nyata dan abstrak, yang dapat atau tidak dapat diuangkan, serta manfaat dan biaya yang bersifat langsung dan tidak langsung.

5. PENUTUP / KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan terhadap peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan teori Evaluasi Kebijakan menurut Bardach, (Patton dkk., 2013), mencakup kriteria *Technical Feasibility* dan *Administrative Operability* belum berjalan efektif dan optimal. Namun pada kriteria *Political viability* dan *Economy and Financial Possibility* sudah cukup berjalan dengan baik. Hal itu dilihat bahwa pengeluaran pegawai di Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat ditutupi oleh Pendapatan Asli

Daerah, dengan sisa anggaran hanya sekitar 1%-2% setelah pengurangan, sehingga tidak mencukupi untuk belanja lainnya seperti barang/jasa, hibah, modal, dan prioritas lainnya. Dengan pengeluaran pegawai yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk membayar pegawai.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan pada kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah di provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah melalui kriteria *Technical Feasibility* adalah dengan mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih dan lebih terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak daerah. Melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, maka proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan pajak daerah dapat dilakukan dengan lebih efisien, maksimal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G, Subarsono. (2013) *Analisis kebijakan publik: Konsep teori dan praktik*. Pustaka Pelajar.
- A., Morissan M. dkk. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Andhika, L. R. (2019). *Pemodelan Kebijakan Publik : Tinjauan Dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah (Public Policy Modeling : Overview and Analysis for Government Policy Brief)*. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2, 22–35.
- Aprianti, Y. (2020). Deteksi Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah. *Jurnal Forum Ekonomi*, 22(1), 114–122.
- Ariyanti, Y. P., & Hazin, M. (2024). Evaluasi Kebijakan kurikulum Merdeka. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(1), 23-29.
- Budi Winarno. (2008). *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta.
- Brocker, J., Dohse, D., & Rietveld, P. (2019). Infrastructure and regional development. *Handbook of Regional Growth and Development Theories: Revised and Extended Second Edition*, 172–197. <https://doi.org/10.4337/9781788970020.00016>.
- Chompson, M., dan Navratil, J.(1977). *An Improved method for estimating the total taxable resource of the states*. United States Departement of the treasury.
- Denis A. Rondinelli. (2007). *Goverments serving people: The charging roles of publik administration in democratic governance. Paper presented in public administration and democratic governance: Government serving citizens &th global on forum reinventing government: Building trust in government*. Vienna: Austria.
- Dunn, W. N, (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto)*. Gajah mada University Press.
- Ginting, A. (2019). *Evaluasi kebijakan peraturan daerah kabupaten langkat no. 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu pada kantor pelayanan terpadu kabupaten langkat*. [Https://Repository.Uma.Ac.Id/](https://Repository.Uma.Ac.Id/), 8–51.
- Hasan. Iqbal, (2004). *Analisis data penelitian dengan statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Husein Umar. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*. Jakarta: Rajawali.

- Idrus. (2019). *Evaluasi dalam proses pembelajaran*, 2, 920–935.
- Kementrian Keuangan, R. I. (2020). *Peta kapasitas fiskal daerah 2020 RI* (p. 25).
- Limpele, J. J., Rotinsulu, D. C., & Rorong, I. P. F. (2021). *Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta dampaknya terhadap kapasitas fiskal provinsi sulawesi utara. pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 22 (1), 84–99. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/34326%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/download/34326/32280>
- Masengi, E. E. (2023). *Reformasi administrasi publik*. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode penelitian kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah, & Maria. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian Kota Di Provinsi Bengkulu*. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 60–73.